



**SALINAN**

**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pedoman untuk proses penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang penyusunannya dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 50);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
11. Badan Anggaran DPRD yang selanjutnya disebut Banggar adalah kelengkapan DPRD yang bertugas untuk menyusun APBD.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman umum Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan pedoman dan kalender kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- (2) Pedoman umum penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun:
  - a. perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2021;
  - b. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019; dan
  - c. perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 3

- (1) Pedoman Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. perencanaan dan penganggaran Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
  - b. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
  - c. perencanaan dan penganggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 5 Februari 2020

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 5 Februari 2020

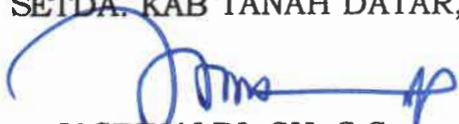
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB TANAH DATAR, ✓



JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 5 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
I.	Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 danPerubahannya	Paling lambat Minggu ke-I bulan Februari 2020	Badan Keuangan Daerah (BKD)
II.	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 - 2026			
1.	Pembentukan Tim penyusunan rancangan teknokratik RPJMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Minggu ke-I bulan Februari 2020	Baperlitbang
2.	Orientasi RPJMD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Minggu ke-I bulan Maret 2020	Baperlitbang
3.	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Minggu ke-III bulan Maret s.d Minggu ke-III bulan April 2020	Baperlitbang
4.	Penyusunan rancangan teknokratik	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Minggu ke-IV bulan April s.d Minggu ke-IV bulan Oktober	Baperlitbang
III.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2021 dan Penyusunan Renja Perangkat Daerah			
1.	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD 2021	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Awal RKPD Provinsi	Paling lambat minggu ke-II Januari 2020	Baperlitbang

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
2.	Permintaan dan Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD Kepada Pemerintah Daerah	Hasil reses yang sudah disampaikan pada rapat Paripurna	Paling lambat minggu ke-II Januari 2020	Baperlit-bang
3.	Penyusunan rancangan awal renja Perangkat Daerah	Renstra Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, hasil evaluasi renja Perangkat daerah Tahun Berjalan.	Paling lambat minggu ke-II Januari 2020	Baperlit-bang
4.	Konsultasi Publik tentang Rancangan Awal RKPD	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025,	Minggu ke-IV bulan Januari 2020	Baperlit-bang
5.	Penyampaian Surat Edaran Bupati tentang Pedoman penyempurnaan rancangan awal renja perangkat daerah Tahun 2021	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Awal RKPD Provinsi	Minggu ke-II Februari 2020	Baperlit-bang
6.	Musrenbang Nagari Tahun 2020	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, RPJM Nagari, Perda Nomor 5 Tahun 2010, Perbup Nomor 50 Tahun 2015	Minggu ke-III bulan Januari s/d Minggu ke-II Februari 2020	Dinas PMDPPKB

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
7.	Musrenbang Kecamatan Tahun 2020	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan RKPD, Hasil Musrenbang Nagari, Perda Nomor 5 Tahun 2010, Perbup Nomor 50 Tahun 2015	Minggu ke-IV bulan Februari s/d minggu ke-I bulan Maret 2020	Baperlit-bang
8.	Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Minggu ke-III s/d minggu ke-IV bulan Februari 2020	Baperlit-bang
9.	Forum Internal Perangkat Daerah Tahun 2020	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan Awal RKPD, Hasil Musrenbang Kecamatan	Minggu ke-I bulan Maret 2020	Perangkat Daerah
10.	Forum Perangkat Daerah Tahun 2020	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan Awal RKPD, Hasil Musrenbang Kecamatan, Perda Nomor 5 Tahun 2010, Perbup Nomor 50 Tahun 2015	Minggu ke-II bulan Maret 2020	Baperlit-bang

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
11.	Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2020	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, Rancangan Awal RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah	Minggu ke-III dan ke-IV bulan Maret 2020	Baperlit-bang
12.	Musrenbang Kabupaten Tahun 2020	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan RKPD, Hasil Musrenbang Kecamatan, Hasil Forum Perangkat Daerah, Perda Nomor 5 Tahun 2010, Perbup Nomor 50 Tahun 2015	Minggu ke-III bulan Maret 2020	Baperlit-bang
13.	Perumusan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, Rancangan RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan RKPD, Hasil Musrenbang Kabupaten	Minggu ke-IV bulan Maret 2020	Baperlit-bang
14.	Penyampaian rancangan akhir RKPD Tahun 2021 kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh perangkat daerah	Permendagri 86 tahun 2017, Rancangan RKPD dan Hasil Musrenbang RKPD	Minggu ke-IV bulan Maret 2020	Baperlit-bang
15.	Review APIP	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017	Minggu ke-IV bulan Maret 2020	Inspektorat

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
16.	Penyampaian Ranperbup tentang RKPD Tahun 2021 ke Gubernur untuk difasilitasi	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015	Minggu ke-I bulan April 2020	Bagian Hukum Setda
17.	Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2021	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Minggu ke-IV bulan Mei 2020	Baperlit-bang
18.	Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Minggu ke-II bulan Juni 2020	Perangkat Daerah
19.	Persiapan Penyusunan RKPD TA 2021	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Minggu ke-III s/d minggu ke-IV bulan Desember 2020	Baperlit-bang & Perangkat Daerah terkait
20.	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD 2022	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Awal RKPD Provinsi	Minggu ke-II Desember 2020 s/d minggu ke-II Januari 2021	Baperlit-bang
21.	Permintaan dan Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD Kepada Pemerintah Daerah	Hasil reses yang sudah disampaikan pada rapat Paripurna	Minggu ke-II Desember 2020 s/d minggu ke-II Januari 2021	Baperlit-bang
22.	Penyusunan rancangan awal renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Renstra Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, hasil evaluasi renja Perangkat daerah Tahun Berjalan.	Minggu ke-II Desember 2020 s/d minggu ke-II Januari 2021	Baperlit-bang
III.	Penyusunan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021			
1.	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta peraturan terkait lainnya, Pedoman Penyusunan APBD TA 2021	Minggu ke- II bulan Juni 2020	Baperlit-bang

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
2.	Penyampaian Rancangan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 oleh TAPD kepada Bupati	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta peraturan terkait lainnya, Pedoman Penyusunan APBD TA 2021	Paling lambat Minggu I bulan Juli 2020	Baperlit-bang
3.	Review APIP	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017	Minggu ke-I bulan Juli 2020	Inspektorat
4.	Penyampaian Rancangan KU-PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 oleh Bupati kepada DPRD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta peraturan terkait lainnya, Pedoman Penyusunan APBD TA 2021	Paling lambat Minggu II bu'an Juli 2021	Baperlit-bang
5.	Pembahasan Rancangan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta peraturan terkait lainnya, Pedoman Penyusunan APBD TA 2021	Minggu ke-III s/d minggu ke-IV bulan Juli 2020	Baperlit-bang
6.	Kesepakatan antara Bupati dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta peraturan terkait lainnya, Pedoman Penyusunan APBD TA 2021	Paling lambat minggu ke- I bulan Agustus 2020	Baperlit-bang
IV.	Penyusunan RKA- Perangkat Daerah Tahun 2021			
1.	Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD dan penyampaian draft RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD oleh Perangkat Daerah	Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2021	Paling lambat minggu ke- III bulan Agustus 2020	BKD
2.	Penelitian dan Pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD	Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2020, Pedoman Penyusunan RKA- Perangkat Daerah	Paling lambat minggu ke- III bulan Agustus 2020	BKD

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
V.	Penyusunan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Ranperbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021			BKD
1.	Penyusunan Ranperda APBD TA 2021 dan Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2021	Pedoman Penyusunan APBD TA 2021, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2021	Minggu ke-IV bulan Agustus 2020	BKD
2.	Penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021 oleh PPKD kepada Bupati	Pedoman Penyusunan APBD TA 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya	Minggu ke-I bulan September 2020	BKD
3.	Penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan oleh Bupati kepada DPRD	Pedoman Penyusunan APBD TA 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat Minggu ke-I bulan September 2020	BKD
4.	Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Pedoman Penyusunan APBD TA 2021, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2021	Minggu ke-II bulan Oktober s/d minggu ke-I bulan November 2020	BKD
5.	Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda APBD	Hasil Pembahasan Ranperda APBD antara TAPD dan Banggar DPRD	Akhir bulan November 2020	BKD
6.	Evaluasi Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021 oleh Gubernur	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda APBD	Minggu ke-III bulan November s/d minggu ke-I bulan Desember 2020	BKD
7.	Penyempurnaan Ranperda APBD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur	Hasil Evaluasi Gubernur atas Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda APBD TA 2021	Minggu ke-II bulan Desember 2020	BKD

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
8.	Penetapan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda APBD tahun Anggaran 2021 dan Penetapan Ranperbup Penjabaran APBD Tahun 2021 menjadi Perbup Penjabaran APBD Tahun 2021	Pedoman Penyusunan APBD TA 2021, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2021	Paling lambat akhir Desember (31 Desember 2020)	BKD
VI.	Penetapan DPA-SKPD dan DPA-PPKD Tahun Anggaran 2021			
1.	Penyusunan DPA SKPD dan DPA-PPKD	Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan DPA-SKPD, DPA PPKD Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2021, Peraturan Daerah tentang APBD TA 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2021	Paling lambat minggu ke-I bulan Januari 2021	BKD
2.	Penelitian DPA-SKPD dan DPA PPKD oleh Tim Peneliti DPA- SKPD dan DPA-PPKD	DPA- SKPD, Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan DPA- SKPD, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2021, Peraturan Daerah tentang APBD TA 2021	Minggu ke-II s/d minggu ke-III bulan Januari 2021	BKD
3.	Pengesahan DPA - SKPD	DPA-SKPD, DPA-PPKD KU PPAS APBD TA 2021, Perda APBD TA 2021 dan Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun 2021	Minggu ke-III bulan Januari 2021	BKD

**Keterangan:**

Kalender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan/atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan RAPBD 2021.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KAB. TANAH DATAR, ✓

JASRINALDI, SH, S.Sos  
 NIP. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 5 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB
1.	Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama disertai dengan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya oleh PPKD kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah	Peraturan Daerah APBD TA 2019, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-II bulan Juli 2020	BKD
2.	Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama disertai dengan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya	Peraturan Daerah APBD TA 2019, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-III bulan Juli 2020	BKD
3.	Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama disertai dengan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Peraturan Daerah APBD TA 2019, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-IV bulan Juli 2020	BKD

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
4.	Rekonsiliasi Laporan Keuangan TA 2019 antara Perangkat Daerah dengan PPKD	Peraturan Daerah APBD TA 2019, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-I dan II bulan Januari 2020	BKD
5.	Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah TA 2019 kepada Bupati melalui PPKD	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2019, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-I dan II bulan Februari 2020	BKD
6.	Review APIP	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017	Minggu ke-III bulan Februari 2020	Inspektoral
7.	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2019 oleh Bupati kepada BPK	Peraturan Daerah APBD TA 2019, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat tanggal 31 Maret 2020	BKD

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
8.	Pemeriksaan oleh Tim BPK	Peraturan Daerah APBD TA 2019, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-IV bulan Januari s/d minggu ke-II bulan Mei 2020 <u>Pemeriksaan Pendahuluan</u> : Minggu ke-IV Januari s/d Minggu ke-IV bulan Februari. <u>Pemeriksaan Terinci</u> : Minggu ke-III bulan Maret s/d Minggu ke-IV bulan April.	BKD
9.	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2019 oleh BPK	Peraturan Daerah APBD TA 2019, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat Minggu ke-II bulan Mei 2020	BKD
10.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 (Nota Pertanggung jawaban Keuangan TA 2019) oleh Bupati kepada DPRD	Peraturan Daerah APBD TA 2019, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat minggu ke-IV bulan Juni 2020	BKD
11.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 dengan DPRD	Peraturan Daerah APBD TA 2019, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat minggu ke-III dan ke-IV bulan Juli 2020	BKD

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
12.	Pendapat Akhir DPRD dan Persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban, Pelaksanaan APBD TA 2019	Peraturan Daerah APBD TA 2019, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat Minggu ke-IV bulan Juli 2020	BKD
13.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 oleh Gubernur	Peraturan Daerah APBD TA 2019, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat Minggu ke-II s/d minggu ke IV bulan Agustus 2020	BKD
14.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019	Peraturan Daerah APBD TA 2019, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat Minggu ke-I bulan September 2020	BKD

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KAB. TANAH DATAR, ✓



JASRINALDI, SH, S.Sos  
 NIP. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 5 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
I.	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Perubahan RKPD Tahun 2020			
1.	Persiapan Rancangan Perubahan RKPD dan Penyampaian Rancangan Perubahan RKPD ke Perangkat Daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021, Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenan	Minggu ke II s.d Minggu ke II bulan Juni 2020	Baperlitbang
2.	Penyampaian Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun berkenan	Minggu ke III bulan Juni 2020	Baperlitbang
3.	Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2020	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD, Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020, Renstra,	Minggu ke-III bulan Juli 2020	Baperlitbang
4.	Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD, Perubahan RKPD Tahun 2020, Renstra,	Paling lambat 3 minggu setelah Perubahan RKPD di tetapkan	Baperlitbang
5.	Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD, Perubahan RKPD Tahun 2020, Renstra,	Paling lambat 1 bulan setelah Perubahan RKPD ditetapkan	Baperlitbang

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
II.	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020			
1.	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Minggu ke-III dan ke-IV bulan Juli 2020	Baperlitbang
2.	Penyampaian Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 oleh TAPD kepada Bupati	Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya, Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020	Paling lambat Minggu ke-I bulan Agustus 2020	Baperlitbang
3.	Penyampaian Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 oleh Bupati kepada DPRD	Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Minggu ke-I bulan Agustus 2020	Baperlitbang
4.	Pembahasan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya, Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020	Minggu ke-I bulan Agustus 2020	Baperlitbang
5.	Penetapan Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2020	Hasil Pembahasan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2020	Paling lambat Minggu ke-II bulan Agustus 2020	Baperlitbang

II.Penyusunan....

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
II.	Penyusunan RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020			
1.	Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD Perubahan APBD TA 2020	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2020	Paling lambat Minggu ke-III bulan Agustus 2020	BKD
2.	Penelitian dan Pembahasan RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD Perubahan APBD TA 2020	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2019, Surat Edaran Bupati perihal Pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah dan DPPA Perubahan APBD TA 2020	Minggu ke-III dan ke-IV bulan Agustus 2020	BKD
III.	Penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Ranperbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2020			
1.	Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA 2020 dan Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2020	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2020, Perubahan RKPD Tahun 2020, Pedoman Penyusunan APBD TA 2020	Minggu ke-I bulan September 2020	BKD
2.	Penyampaian Ranperda Perubahan APBD Tahun 2020 oleh PPKD kepada Bupati	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2020, Perubahan RKPD Tahun 2020, Pedoman Penyusunan APBD TA 2020	Minggu ke-I bulan September 2020	BKD
3.	Penyampaian Ranperda Perubahan APBD Tahun 2020 oleh Bupati kepada DPRD	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2020, Perubahan RKPD tahun 2020, Pedoman Penyusunan APBD TA 2020	Paling lambat minggu ke-II bulan September 2020	BKD
4.	Pembahasan Ranperda Perubahan APBD TA 2020 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2020, Perubahan RKPD Tahun 2020, Pedoman Penyusunan APBD TA 2020	Minggu ke-III dan ke-IV bulan September 2020	BKD

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
5.	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD TA 2020	Hasil Pembahasan Ranperda Perubahan APBD TA 2020 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Minggu ke-IV bulan September 2020	BKD
6.	Penyampaian Ranperda Perubahan APBD TA 2020 untuk dievaluasi oleh Gubernur	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD TA 2020	Paling lambat minggu ke-IV bulan September 2020	BKD
7.	Penetapan hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD TA 2020 oleh Gubernur	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD	Minggu ke-III bulan Oktober 2020	BKD
8.	Penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD TA 2020 sesuai hasil evaluasi Gubernur	Hasil evaluasi Gubernur atas Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD	Minggu ke-IV bulan Oktober 2020	BKD
9.	Penetapan Ranperda Perubahan APBD TA 2020 menjadi Perda Perubahan APBD TA 2020 dan Penetapan Ranperbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2020 menjadi Perbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2020	Penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD TA 2020 sesuai hasil evaluasi Gubernur	Minggu ke-IV bulan Oktober 2020	BKD
IV.	Penetapan DPPA- SKPD Tahun 2020			
1.	Penyusunan DPPA-SKPD Tahun 2020	Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan DPPA-SKPD, Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2020, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2020, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020	Minggu ke-I bulan November 2020	BKD

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
2.	Penelitian DPPA - SKPD oleh Tim Peneliti DPPA Perangkat Daerah	Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan DPPA-SKPD, Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2020, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2020, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020	Minggu ke-I dan ke-II bulan November 2020	BKD
3.	Pengesahan DPPA-SKPD	Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan DPPA-SKPD, Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2020, Perda Perubahan APBD TA 2020, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020	Minggu ke-II bulan November 2020	BKD

Keterangan:

Kalender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR, ✓

JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002